

SIARAN PERS**Otorita Ibu Kota Nusantara**

25 Maret 2022

ASN Menanti Kehidupan yang Lebih Baik di IKN

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skema dan mekanisme pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan cermat. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa tahap pertama pemindahan akan berlangsung pada tahun 2024. Pada tahap itu jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan adalah 16.990 orang.

Seiring dengan persiapan tersebut, Pemerintah juga terus menggenjot pembangunan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. Persiapan pemindahan ASN sudah berjalan mulai dari rapat koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan persiapan lainnya.

Farida Dewi Maharani, Fungsional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan bahwa pemindahan IKN menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan Kota Jakarta, selain itu juga untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta khususnya serta pemerataan ekonomi bukan hanya terpusat di Jawa.

Dari sisi jumlah penduduk, menurut data BPS (2020-2022), Jakarta (kisaran 10 juta orang), Jawa Barat (48 juta), Jawa Timur (40 juta), Jawa Tengah (36 juta), bahkan Banten (11 juta). Namun, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tangerang) yang setiap hari melaju dari provinsi mereka menuju Jakarta.

Jika memang ada ibu kota baru, maka nantinya ada kisaran 970 ribu ASN Pusat (data BKN per Juni 2022) yang akan digeser ke IKN. Angka ini tentu akan mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, dan angka ini belum termasuk anggota keluarga yang akan diikutsertakan dalam proses pemindahan IKN.

“Momen ini menjadikan momen untuk memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kota yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik dan layanan publik yang lebih manusiawi,” tambah Dewi panggilan akrabnya.

Menurut Dewi, dia bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern serta udara lebih sehat. “Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan,” tegas Dewi.

Senada dengan Dewi, Suharnitik, S.E., Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Nasional mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan perpindahan ibu kota, karena dengan adanya pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan dapat memperlancar perekonomian. “Seyogyanya diberikan tunjangan kinerja secara khusus dan ditambah tunjangan lainnya yang dapat menarik minat dari ASN,” tambahnya.

Dewi juga menambahkan bahwa antusiasme ASN dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut, minimal kebutuhan-kebutuhan dasar hidup dapat dipenuhi, seperti pasar untuk kebutuhan makan sehari-hari, sekolah untuk ASN yang memiliki keluarga yang masih sekolah minimal SD-SMA, dan rumah sakit. Jika kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi, maka secara otomatis tidak ada alasan untuk menolak pindah.

“Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi. Dan buat yang berkeluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka,” kata Dewi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris OIKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, menyebutkan bahwa fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain sudah direncanakan semenjak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.

“Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan. Sebagai contoh Rumah Sakit bertaraf Internasional rencananya akan hadir di KIPP, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik,” ujar Jaka.

Dewi yang sehari-harinya bekerja di Direktorat Pengelolaan Media, Ditjen IKP, Kominfo mengungkapkan bahwa dirinya mengharapkan lingkungan untuk hidup yang jauh lebih layak, sehat dan tertib. “Semoga IKN dapat menerapkan konsep *green economy*, sehingga tidak mengorbankan hutan Kalimantan yang hijau namun memberikan kehidupan peradaban yang lebih baik,” katanya.

Perpindahan ibu kota ke Nusantara bukan hanya akan memberikan dampak positif bagi ASN dan masyarakat sekitar, tetapi juga bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. IKN diharapkan dapat menjadi kawasan pusat pemerintahan yang modern dan efisien, dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Dewi, ASN tidak akan menolak untuk dipindahkan selama mereka mendapat informasi yang jelas terkait proses pemindahan. “Apalagi jika mereka akan diberikan prioritas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, tidak mengalami kemacetan, mendapatkan hunian asri dan modern serta udara yang lebih sehat,” tegas Dewi.

Dalam jangka panjang, pindahnya ibu kota diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan, dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, perpindahan ibu kota juga tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi Indonesia.

“Masih banyak tantangan lain yang perlu diatasi, seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Oleh karena itu, perpindahan ibu kota harus diikuti dengan upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan,” ujar Dewi.

Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara

Narahubung: Sekretariat OIKN
(+62) 811-8115-8888

Website : ikn.go.id
Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)
Twitter : twitter.com/ikn_id
Youtube : [IKN Indonesia](https://www.youtube.com/IKN Indonesia)

#KotaDuniauntukSemua
#Nusantara
#IbuKotaNegara

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022.

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas hampir 4x Jakarta yaitu kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare).

DOKUMENTASI FOTO
Sumber: Otorita Ibu Kota Nusantara

